

## Jejak VOC dan Pembentukan Administratif Pemerintahan Hindia Belanda di Pontianak Kalimantan Barat

Sem Touwe<sup>1✉</sup>, Jems Sopacua<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Pattimura.Indonesia

Correspondence Author: [drs.semt@yahoo.com](mailto:drs.semt@yahoo.com)<sup>✉</sup>

### Article history

Received : 2023-02-22

Accepted : 2023-05-24

Published : 2023-06-18

### Kata Kunci:

VOC, Hindia Belanda  
Pontianak

**Abstract:** The purpose of the study is to reconstruct the past of the VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) activities in Pontianak, West Kalimantan in the 16th century to the attempt to occupy the area for trade purposes and then the efforts of the Dutch East Indies government to legitimize its power in the early 18th century. This paper is to reconstruct the traces of the VOC, the Dutch East Indies trading company in Pontianak, West Kalimantan. The area which was originally under the rule of the first Sultan of Pontianak Syarif Abdurrahman who pioneered the initial settlement and trading activities with traders from the archipelago and the outside world is also highlighted in this research. Therefore, the problems that will be studied in this research are: 1) What were the conditions of the early life of the people of Pontianak before the arrival of the VOC? 2) What was the attitude of the local authorities and the community when they received the VOC in Pontianak? 3) What was the main purpose of the VOC occupying the Pontianak Territory? 4) How was the process of forming the administrative area of the Dutch East Indies in Pontianak? The method used in this writing is the historical method which consists of heuristics, verification, and interpretation stages to make a deeper analysis and interpretation of the data that has been criticized and then sorted to arrive at the last stage, namely Historiography. The results of the reconstruction of the VOC traces to efforts to legitimize the power of the Dutch East Indies government in Pontianak show that due to competition in the world of trade between various traders from the archipelago and China, England, India, Portugal, Spain in Pontianak resulted in occupation and colonization by the Dutch. In addition, the occupation of the Pontianak area by the Dutch was to dispel pirates who always made traders uncomfortable from the Malacca Strait, the West Coast of Borneo, the Sulu Islands, Mindanao to the Maluku islands.

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merekonstruksi masa lalu dari aktivitas VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) di Pontianak Kalimantan Barat pada abad 16 sampai dengan upaya pendudukan wilayah tersebut untuk kepentingan perdagangan dan kemudian upaya pemerintah Hindia Belanda untuk melegitimasi kekuasaannya di awal abad 18. Yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini adalah merekonstruksi jejak VOC, perusahaan dagang Hindia Belanda di Pontianak Kalimantan Barat. Wilayah yang semula merupakan kekuasaan dari Sultan pertama Pontianak Syarif Abdurrahman yang merintis pemukiman awal dan aktivitas perdagangan dengan para pedagang Nusantara maupun dunia luar, disoroti juga dalam penelitian ini. Karena itu masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah: 1) Bagaimana kondisi kehidupan awal masyarakat Pontianak sebelum kedatangan VOC? 2) Bagaimana sikap penguasa lokal dan masyarakat saat menerima VOC di Pontianak? 3) Apa tujuan utama VOC menduduki Wilayah Pontianak? 4) Bagaimana proses pembentukan daerah administratif Hindia Belanda di Pontianak? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yang terdiri dari tahap heuristik, verifikasi, interpretasi untuk membuat analisis maupun penafsiran lebih mendalam terhadap data yang telah dikritik dan kemudian dipilah-pilah untuk sampai pada tahap terakhir yaitu Historiografi. Hasil rekonstruksi dari jejak VOC sampai upaya melegitimasi kekuasaan pemerintahan



Available online at  
<http://jim.unsyiah.ac.id/sejarah/>

Hindia Belanda di Pontianak menunjukkan bahwa akibat persaingan dalam dunia perdagangan antara berbagai pedagang baik nusantara maupun Cina, Inggris, India, Portugis, Spanyol di Pontianak mengakibatkan pendudukan dan penjajahan oleh Bangsa Belanda. Selain itu pendudukan wilayah Pontianak oleh Bangsa Belanda adalah untuk menghalau bajak laut yang selalu melakukan ketidaknyamanan para pedagang mulai dari Selat Malaka, Pantai Barat Borneo, Kepulauan Sulu, Mindanau sampai di kepulauan Maluku.

## PENDAHULUAN

Pulau Kalimantan yang kental disapa oleh para penduduk pribumi dengan nama Borneo selalu menjadi perhatian yang khusus dalam bayangan para pelaut dan pedagang Eropa. Pulau besar dalam bayangan awal orang Eropa adalah hutan lebat tempat berteduhnya binatang mamalia orang hutan dengan puluhan suku asli Dayak yang mahir mengayau atau pemburu kepala manusia. Pulau Borneo merupakan pulau terbesar ketiga di dunia setelah *Greenland* dan Papua ini, terletak di tengah-tengah kepulauan Nusantara serta memiliki topografi yang homogen. Dijelaskan oleh Hermansyah dalam tulisannya: Ilmu Gaib di Kalimantan Barat, bahwa Borneo adalah sebuah daratan yang tidak rata, dengan hutan lebat, dilalui oleh sungai sungai besar seperti Kapuas, Mahakam, Rejang, Baram, dan Barito (Hermansyah, 2010). Pulau Borneo atau Kalimantan merupakan salah satu wilayah penyebaran ras Austroneia seperti yang dikemukakan oleh Karina Arifin bahwa berdasarkan rekonstruksi arkeologi diperoleh keterangan bahwa penyebaran ras Austronesia meliputi wilayah Borneo, (Kalimantan) Taiwan, Philipina, Sulawesi, dan sebagian melakukan ekspansi ke Maluku terutama orang-orang Melayu (Arifin et al., 2006).

Diperkirakan jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara, Pulau Borneo telah didatangi oleh orang-orang Tiongkok sejak abad-abad awal masehi kemungkinan sejak abad ke 3 SM dan membangun relasi dalam dunia perdagangan dengan penduduk di pulau

tersebut. Beberapa sumber tertulis menjelaskan bahwa dalam sejarah Dinasti Tionghoa sekitar tahun 600 dan 1500 M, ada beberapa lawatan ke Negeri Tiongkok yang dilakukan oleh duta-duta dari "Po-lo, P'oli, Poni, ye-Po-ti, yang diyakini bahwa nama-nama tersebut merupakan tempat-tempat yang terdapat di pantai Barat Borneo (Hermansyah, 2010).

Dari sisi letak astronomi, Pontianak memiliki kedudukan yang sangat strategis karena berada diantara  $1^{\circ} 02'24''$  lintang utara sampai  $0 05' 37''$  lintang selatan dan  $109^{\circ} 16' 25''$  bujur Timur sampai  $109^{\circ} 23' 24''$  bujur timur (Dana, 2013). Berbeda dengan orang Eropa karena pertama kali mereka berhubungan dengan penduduk Pulau Borneo pada awal abad ke 16 melalui hubungan dagang, namun belum terkonsentrasi secara penuh. Pada awal kedatangan bangsa Belanda khususnya para pedagang dan pelaut yang tergabung dalam kongsi dagang Belanda VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) mereka belum tertarik pada pulau Borneo, Jawa, dan Sumatera, sekalipun tergolong pulau-pulau besar di Nusantara (Uray, 2017). Mereka lebih terfokus untuk mencari pusat rempah-rempah cengkih dan pala di Kepulauan Maluku yang sangat mahal di Eropa saat itu (Sujana, 2019). Sebab itu ketika bangsa Eropa pertama Portugis menginjakkan kakinya di Malaka pada tahun 1511 (Hutauruk, 2020). Mereka kemudian lebih memilih melanjutkan misi perdagangan mereka menuju Maluku pusat rempah-rempah, dan kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol dibawah pemimpin ekspedisi Juan

Sebastian de El Canno tiba di pulau Tidore Maluku Utara tahun 1522 (Aman, 2014). Tahun 1699 Belanda tiba di pelabuhan Banten dan kemudian tahun 1905 pimpinan angkatan laut Steven van der Hagen berlayar dari Banten dengan sejumlah armada perang merebut Maluku dari tangan Portugis di pulau Ambon.

Yang menarik adalah ketika Inggris di abad 17 mulai menaruh perhatian yang serius terhadap wilayah Kalimantan Barat dalam dunia perdagangan setelah berhasil membangun Singapura sebagai pusat perdagangan Internasional dan pelabuhan bebas pada 1819, sehingga menarik banyak para pedagang seperti Bugis, Jawa, dan Cina untuk melakukan perdagangan terutama komoditi rempah-rempah, porselin, dan tekstil yang meramaikan pasar Singapura saat itu (Johan F cady, 1976).

Sebenarnya bukan saja Inggris, karena Belanda juga mempunyai kepentingan yang sama untuk melanggengkan aktifitas perdagangan rempah-rempah maupun tekstil dan lain yang diangkut melalui jalur niaga seperti yang telah disebutkan sebelumnya, karena itu para bajak laut termasuk orang-orang Galela Tobelo dari Maluku Utara yang selalu menjarah kapal-kapal asing maupun lokal harus dipatahkan. Ketidakstabilan perdagangan maritim saat itu mendorong pedagang Belanda VOC maupun Inggris EIC untuk menguasai daerah-daerah tertentu untuk melegitimasi kekuasaan dan kekuatan mereka baik di laut maupun di darat. Pontianak yang strategis karena berada pada jalur perdagangan maritim saat itu sangat rumit disebabkan karena sering para pedagang dirampok oleh para bajak laut dari orang-orang Melayu, Bugis dan Cina yang telah lama bermukim di Pontianak jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara (Kartodirdjo, 1971). Dinamika kegiatan pelayaran niaga menjadi kompleks sejak munculnya para perompak atau bajak laut yang cenderung melakukan hal kekerasan. Bajak laut disebut

sebagai orang yang melakukan berbagai tindakan kekerasan di laut tanpa mendapat perintah atau kewenangan dari pemerintah untuk melakukan tindakan perampokan (Lapian, 2009). Sasaran utama penyerangan para bajak laut ialah sebagian akbar kapal-kapal dan juga daerah-daerah kolonial (Hasanuddin, 2019).

Terdapat kajian penelitian sebelumnya yang relevan dilakukan oleh P.J.Veth menulis tentang "*Borneo's Wester Afdeling: Geographisch, Statistisch, Historisch*". Tulisan yang dianggap langkah dan sangat bermanfaat karena membahas mengenai wilayah *afdeling* Pontianak yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1839. Penjelasannya sangat membantu penulis terutama untuk merekonstruksi wilayah *afdeling* Pontianak yang sangat luas dan memiliki keadaan alam yang homogen termasuk struktur permukaan tanah atau tofografi Kalimantan Barat. Tulisan yang tidak kalah menarik dan memiliki tingkat relevansi dengan judul penulisan ini adalah karya Purwana, Bambang H.S, dkk yang berjudul " Sejarah Pemerintahan Pontianak dari masa ke masa. Tulisan ini banyak memberikan gambaran umum wilayah Pontianak mulai dari letak astronomi, keadaan musim, struktur tanah sampai dengan Pontianak menjadi pintu utama dalam dunia perniagaan setelah Singapura dijadikan sebagai pelabuhan Internasional.

John.F. Cady dalam karya besarnya "*Southeast Asia: Its Historical Development*" banyak menjelaskan aktivitas perdagangan dari para pedagang Inggris dan Belanda di Singapura dan Pontianak Kalimantan Barat. Yang terkait langsung dengan judul tulisan ini adalah penjelasan penulis buku mengenai Pemerintah Hindia Belanda menjadikan Pontianak sebagai pintu utama dalam dunia perdagangan untuk menyaingi Inggris di Singapura sebagai pelabuhan terbuka sehingga bias diketahui jejak-jejak pemerintah Hindia Belanda di Pontianak.

Karya yang sangat penting ini membahas juga upaya Belanda dan Inggris untuk melumpuhkan aktivitas bajak laut yang sering merugikan para pedagang asing maupun lokal.

Dana Listiana menulis tentang *"Tumbuh dan Berkembangnya Sebuah Pasar Kota, Pasar Cina Pontianak Abad ke-19 Sampai Abad ke 20"*. Tulisan yang sangat inspiratif ini memberikan gambaran mengenai wilayah afdeling Pontianak yang mulai di rintis oleh VOC dan kemudian dijadikan sebagai wilayah administrative pemerintah Hindia Belanda sehingga dapat membantu merekonstruksi jejak VOC di Pontianak Kalimantan Barat. Tulisan Hasannudin yang dimuat pada jurnal Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado yang berjudul; *Politik dan Perdagangan Kolonial Belanda Di Pontianak*, lebih banyak menyoroti aspek perdagangan colonial Belanda di Pontianak Kalimantan barat. Hubungan Pontianak dengan perdagangan VOC kongsi dagang Belanda dengan EIC atau badan dagang Inggris ikut disoroti dalam tulisan ini sampai pada kontrak politik antara pihak kesultanan Pontianak dengan pihak VOC yang memulai perluasan kekuasaan dan politik monopoli. Perjanjian-Perjanjian antara Sultan Pontianak dengan pihak VOC dapat dijadikan sebagai bahan analisis untuk mengetahui rekam jejak VOC di Pontianak Kalimantan barat.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih memfokuskan pada permasalahan bagaimana VOC melakukan politik penguasaan wilayah di Pontianak dengan melibatkan sultan Pontianak sebagai mitra pesemakmuran saat itu. Bagaimana strategi penguasaan wilayah dengan membentuk pusat-pusat pemerintahan sipil untuk kepentingan perniagaan VOC di Pontianak. Kajian ini difokuskan pada periodisasi sejarah VOC sampai pembentukan wilayah-wilayah administratif oleh pemerintah Hindia Belanda di Pontianak. Berdasarkan

latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka masalah dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana kehidupan politik, sosial, dan ekonomi di Pontianak Setelah kedatangan VOC? 2) Bagaimana prose awal masuknya VOC ke Pontianak dan bagaimana sikap sultan dan masyarakat saat menerima para pedagang dan pelaut bangsa Eropa tersebut? 3) Apa tujuan utama VOC menduduki Wilayah Pontianak? (4) Bagaimana strategi Pemerintah Hindia Belanda dalam menata birokrasi administrasi pemerintahan di Pontianak?

## **METODE**

Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan di atas maka, metode yang digunakan untuk memperoleh sumber-sumber historis adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Herlina, 2008). Langkah pertama yaitu heuristik atau pengumpulan data Heuristik adalah tahap untuk menemukan, dan menghimpun sumber, informasi, dan jejak masa lalu (Gottschalk, 1975). Pada langkah ini penulis berusaha mencari berbagai sumber sejarah yang berkaitan dengan jejak VOC di Pontianak sampai dengan upaya pemerintah Hindia Belanda menjadikan daerah tersebut sebagai pusat administrasi pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan studi literatur terkait dengan fakta-fakta yang diperoleh melalui buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, skripsi, dan Internet. Langkah kedua dalam penelitian sejarah adalah kritik sumber. Kritik sumber merupakan kegiatan untuk mengkaji otentisitas dan kredibilitas sumber. Kritik sumber meliputi kritik ekstern dan kritik interen (Kartodirdjo, 1992). Kritik ekstern dilakukan untuk menilai sumber-sumber sesuai jamannya. Kritik interen dilakukan untuk menilai isi dari sumber apakah relevan dari masalah yang diteliti atau tidak.

Langkah ketiga yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah interpretasi. Interpretasi merupakan cara menentukan fakta-fakta yang saling berhubungan, sehingga memperoleh kesimpulan yang objektif dan rasional berdasarkan aspek permasalahan (Sukmana, 2021). Langkah terakhir dari penelitian sejarah adalah historiografi. Pada tahap historiografi yang perlu diperhatikan adalah proses seleksi, imajinasi, dan aspek kronologis dari masalah yang diteliti (Abdullah & Surmijohardjo, 1983).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kehidupan Politik, Sosial, Dan Ekonomi Di Pontianak Awal Kedatangan VOC**

Pada awal kedatangan VOC di Nusantara tepatnya ketika mereka mulai membuang jangkar di pelabuhan Banten, maka sejak itulah awal babak baru masyarakat di Nusantara menghadapi problematika baik dalam dunia perdagangan, politik maupun sosial. Konsentrasi VOC pada awalnya adalah menguasai wilayah Timur Nusantara terutama Maluku yang kaya akan rempah-rempah. Motivasi untuk menundukan kekuatan Portugis dan Spanyol yang telah mendahului mereka di wilayah penghasil rempah-rempah tersebut benar-benar dibuktikan oleh VOC. Setelah dua kekuatan besar Eropa yang dianggap penghalang bagi kelancaran perdagangan VOC ditaklukan dan supermasi VOC ditegakkan secara penuh di Maluku, maka perhatian mereka mulai diarahkan ke pulau-pulau besar di bagian Barat Nusantara seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan (Borneo) (Hasanuddin, 2016). Sejak itu pula pemerintah Hindia Belanda mulai membentuk dan menertipkan daerah-daerah perdagangan yang potensial dengan cara monopoli perdagangan dan menata secara perlahan-lahan kekuasaan administrasi di setiap daerah termasuk Kalimantan Barat.

Tahun 1779-1784 Sultan Pontianak menerima utusan baru VOC Wolter Markus Stuart yang diterima oleh sultan Pontianak Syarif Abdurahman Alkadrie sebagai mitra bisnis sekaligus sebagai Residen van Borneo's Wester Afdeling I. Sejak kedatangan VOC dibawah pimpinan Wolter Markus Stuart maka dimulailah ekspansi ke berbagai wilayah Kalimantan barat karena dikuatkan dengan berbagai perjanjian atau kontrak politik dengan Sultan Syarif Abdurahman Alkadrie di Pontianak pada tanggal 5 Juli 1779 khususnya menyangkut penduduk Tanah Seribu agar dapat dijadikan oleh VOC sebagai pusat aktivitas (Veth, 1854).

Tanah Seribu kemudian mulai dikembangkan oleh VOC sebagai pusat pemerintahan Resident het Hoofd Westerafdeling van Borneo (Kepala daerah kresidenan Borneo Barat) dan Asisten Resident het Hoofd der Afdelling van Pontianak (Kepala Daerah Kabupaten Pontianak). Walaupun Pontianak telah dirintis untuk mengatur jalannya birokrasi pemerintahan, namun ternyata tidak dikembangkan sebagai pusat niaga secara penuh di zaman VOC. Nantinya baru diperhatikan secara serius oleh pemerintah Hindia Belanda disaat Singapura mulai dijadikan sebagai bandar perniagaan internasional oleh Inggris. Dengan demikian untuk menyaingi Inggris di Singapura maka pemerintah Hindia Belanda lebih terfokus dalam dunia perdagangan terutama untuk menguasai jalur-jalur perdagangan. Sejak tahun 1834 pemerintah Hindia Belanda meberlakukan pelabuhan Pontianak dan pelabuhan Sambas sebagai pelabuhan bebas. Oleh karena itu kapal niaga asing bebas masuk walaupun harus mentaati sejumlah peraturan pelayaran dan perdagangan yang ketat maupun diwajibkan untuk membayar tarif pajak ekspor impor yang tinggi (Rahmayani & Natarsa, 1942).

### **Kerjasama Penguasa Lokal di Pontianak**

### **Dengan Pemerintah Hindia Belanda**

Pada waktu pemerintah Belanda kembali berkuasa di Nusantara pada tahun 1816, Raja-raja Sambas dan Pontianak mengirimkan utusan ke Batavia untuk mengadakan hubungan kerjasama seperti pada masa-masa sebelumnya, dan terutama untuk meminta dukungan pemerintah Hindia Belanda untuk mengatasi kemelut politik yang terjadi dalam tubuh pemerintahan lokal terutama rongrongan-rongrongan yang berasal dari lingkungan keluarga raja-raja kedua kerajaan itu sendiri. Selain itu permohonan kedua penguasa lokal di atas kepada pemerintah Hindia Belanda di Batavia untuk mengatasi orang-orang Cina yang telah membangun koloninya di Pontianak maupun Sambas yang dianggap telah mengambil hak dan tanpa menghargai kedaulatan raja Sambas maupun Pontianak.

Atas dasar permintaan kedua kerajaan itu, pemerintah Hindia Belanda di Batavia memutuskan mengirimkan pejabat-pejabat dan pasukan ke Kalimantan Barat (Hasanuddin, 2016). Pemerintah Belanda sendiri juga sebenarnya berkepentingan untuk kembali menduduki dan menanamkan kekuasaannya di Pontianak karena daerah tersebut sangat potensial dalam dunia perdagangan saat itu. Pemerintah Hindia Belanda juga berkeinginan untuk memberantas para bajak laut yang memilih pantai wilayah tersebut untuk melakukan perompakan terhadap setiap kapal-kapal dagang yang melintasi perairan-perairan baik yang ke arah Laut Cina Selatan maupun yang akan melintasi Selat Malaka dan Laut Jawa secara periodik.

Berdasarkan permintaan Raja Sambas dan Pontianak, seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka dua tahun kemudian barulah pemerintah Hindia Belanda merespons permintaan kedua Raja Sambas dan Pontianak, sehingga tahun 1818 Pemerintah Hindia Belanda mengirim

pasukan ke Kalimantan Barat. Keterlambatan pemerintah Hindia Belanda dalam merespon permintaan Raja Sambas dan Pontianak untuk melakukan kontrol terhadap legitimasi kedua pemerintahan tersebut, menurut penulis disebabkan karena saat itu pemerintah Hindia Belanda belum sepenuhnya menjadikan Kalimantan Barat sebagai wilayah eksploitasi maupun sentra perdagangan secara baik. Pandangan penulis didasari pada kenyataan bahwa wilayah Kalimantan Barat yang dulunya telah didatangi oleh VOC pada tahun 1778 dari Batavia yang dipimpin oleh Willem Ardinpalm, tidak diusahakan secara maksimal oleh VOC sebagai daerah eksploitasi mereka. Di lain sisi Inggris sangat berkepentingan untuk menguasai jalur perdagangan bebas yang sejak lama dikuasai oleh para bajak laut yang beroperasi di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Sulu, Mindanao Pilifina Selatan . Di samping pengaruh Inggris yang sudah dimulai sejak tahun 1811 di Kalimantan Barat terutama untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai basis perdagangan selain Singapura, membuat pemerintah Hindia Belanda secara politik merasa terganggu dengan kehadiran Inggris di Pontianak sehingga mereka segera merespon permintaan raja-raja Sambas dan Pontianak walaupun harus menunggu sampai dua tahun setelah utusan kedua raja tersebut disampaikan.

Faktor inilah yang kemudian, Kalimantan Barat terutama Pontianak, Sambas, Mampawa, dan wilayah lainnya tidak luput dari perhatian pemerintah Hindia Belanda, karena menurut perhitungan mereka bahwa dengan menguasai Kalimantan Barat maka dengan sendirinya telah menguasai jalur perdagangan yang menghubungkan Nusantara bagian barat dan Timur, serta menguasai lalu lintas perdagangan laut Cina Selatan. Dari sisi strategi politik perdagangan, penguasaan jalur niaga laut saat itu sangat

menguntungkan karena terhindar dari para perompak laut yang selalu melihat peluang untuk meraih keuntungan dengan cara merampok. Dengan demikian untuk menyaingi Inggris di Singapura maka pemerintah Hindia Belanda lebih terfokus dalam dunia perdagangan terutama untuk menguasai jalur-jalur perdagangan. Sejak tahun 1834 pemerintah Hindia Belanda meberlakukan pelabuhan Pontianak dan pelabuhan Sambas sebagai pelabuhan bebas. Oleh karena itu kapal niaga asing bebas masuk walaupun harus mentaati sejumlah peraturan pelayaran dan perdagangan yang ketat maupun diwajibkan untuk membayar tarif pajak ekspor impor yang tinggi (Dana, 2013).

Perhitungan inilah yang mendorong pemerintah Hindia Blanda di Batavia mengirim sejumlah pasukan untuk ditempatkan di kota-kota pelabuhan terutama Pontinak, Mampawa dan Sambas. Pada awal kedatangan pejabat-pejabat pemrintah Hindia Belanda dan sejumlah pasukan yang ditempatkan di Pontianak dan Sambas diterima dengan baik, namun setelah para pejabat yang ditempatkan mulai melakukan penataan pemerintahan, ternyata raja-raja di Sambas dan Pontianak tidak mau diinterfensi lebih jauh soal urusan pemerintahan mereka. Kedua raja tersebut bermaksud hanya sebatas mengontrol dan melindungi bukan untuk memerintah. Disatu sisi orang-orang Cina yang telah lama menempati daerah-daerah tambang emas yang potensial tidak mau tunuk terhadap kekuasaan pemerintah Belanda yang ditugaskan di Pontianak, Sambas, Mampawa dan wilayah-wilyah lainnya.

### **Reksturisasi Administratif Hindia Belanda di Pontianak**

Cita-cita pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai wilayah Pontianak, terutama untuk menguasai perdagangan dan menata pemerintahan di tanah jajahan dimulai dengan pembentukan

Afdelingssoofdplaats (ibu Kota Afdeling) pada tahun 1839. Berdasarkan susunan ketatanegaraan pemerintahan Hindia Belanda, yang dibentuk pada 1839 di Pontianak Kalimantan Barat terbagi atas tiga bagian, yaitu (1). Afdeling pantai selatan dan pantai timur, (2). Afdeling Sambas, dan (3). Afdeling Pontianak. Disaat pemerintah Hindia Belanda melakukan reorganisasi pemerintahannya diberbagai wilayah jajahan, maka afdeling Sambas dan Afdeling Pontianak disatukan dengan nama Borneo Wester Afdeling. Wilayah Borneo Wester Afdeling yang wilayahnya sangat luas dan potensial. Terdapat 26 negeri dalam wilayah Borneo Wester Afdeling, antara lain Pontianak, Mampawa, Landak, Tayan, Meliau, Sanggau, Sekadu, Sintang, Sukadana, dan lain-lain.

Afdeling Pontianak berpusat di Afdelingssoofdlaats Pontianak yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen (Veth, 1856). Dari sisi penataan kota dan pengembangan wilayah pemerintahan afdeling Pontianak diarahkan kearah selatan sampai Punggur dan kearah utara sampai ke sungai Pinyu yang berbatasan dengan Mempawah dan Desa Mandor, sedangkan kearah timur laut sapai di perbatasan bekas Kerajaan Landak, Tayan, Meliau, terus ke-sungai Rangkong. Wilayah Afdeling Pontianak yang begitu luas ini dipisahkan oleh sungai Kapuas kecil dan sungai Landak sehingga terbagi menjadi tiga bagian yaitu; sisi utara, selatan dan timur (Veth, 1871). Wilayah yang luas ini merupakan daerah yang potensial dalam dunia perdagangan saat itu karena selain terletak di tengah-tengah kepulauan Nusantara, Afdeling Pontianak juga memiliki keunggulan lain terutama dilalui angin muson sehingga mempermudah para pelaut dan pedagang dapat menempuh dua arah pelayaran setiap tahun..

Dari letaknya yang sangat strategis dalam dunia perdagangan saat itu membuat Pontianak sebagai tempat transit untuk

kemudian mengubah barah/haluan berlayar baik menuju Selat Malaka, Laut Cina Selatan, maupun ke Timur Nusantara dan ke selatan. Dari sisi letak, Pontianak juga berada pada jalur perdagangan Laut Cina Selatan yang meliputi pesisir timur Semenanjung Malaka, Thailand, dan Vietnam Selatan, jaringan laut Jawa, menyusuri kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Pesisir Barat Kalimantan, Jawa dan bagian selatan Sumatera dan jalur sutera antara Cina dan India (Lestiani & Nurcahyani, 2009). Posisi yang strategis dalam jalur perdagangan Asia inilah yang membuat pemerintah Hindia Belanda menaruh perhatian penuh untuk mengembangkan daerah Pontianak sebagai wilayah pemerintahan dan pelabuhan bebas untuk kepentingan perdagangan mereka

Dengan demikian, maka rekonstruksi politik pemerintahan Hindia Belanda khususnya dalam hal melakukan restrukturisasi pemerintahan dan menggabungkan beberapa afdeling, merupakan strategi mengelola administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien untuk menguasai perdagangan di wilayah tersebut. Selain untuk menguasai perdagangan, juga menyangkut rentang kendali roda pemerintahan Kolonial dalam mengontrol suku-suku Dayak yang pada abad ke 19 sering terjadi pergolakan-pergolakan sosial di tanah jajahan termasuk di Pontianak. Kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam menata pemerintahan di Pontianak tidak terlepas dari upaya mereka untuk mengatur perdagangan yang bersifat merkantelisme ketimbang ekonomi liberal. Pada Tahun 1849, kolonial Belanda kembali menggantikan sebuah kresidenan Pantai Barat Borneo dengan menjadikan ibukota Pontianak sebagai Kresidenan Borneo Barat (wester-afdeling van Borneo) untuk menunjukkan bahwa kekuasaan kolonial Belanda tidak terbatas pada wilayah pantai saja, tapi juga sampai jauh kepedalaman, walaupun kenyataannya pejabat kolonial Belanda sangat jarang mengunjungi ke

daerah-daerah pedalaman Pontianak (Harmsen, 1947).

## **PENUTUP**

Kegiatan perdagangan mulanya dikuasai oleh Sultan Pontianak melalui Pangeran Laksamana yang bertugas sebagai syahbandar dan penghubung kepentingan para pedagang, mengatur pajak masuk dan keluar pelabuhan, serta mengawasi pelayaran dan perniagaan. Munculnya persaingan dagang antara Belanda dan Inggris menyebabkan kolonial Hindia Belanda beroptimis untuk mengambil kebijakan monopoli perdagangan di Pontianak. Sejak itu pula pemerintah Hindia Belanda mulai membentuk dan menertibkan daerah-daerah perdagangan yang potensial dengan cara monopoli perdagangan dan menata secara perlahan-lahan kekuasaan administrasi di setiap daerah termasuk Kalimantan Barat. Cita-cita pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai wilayah Pontianak, terutama untuk menguasai perdagangan dan menata pemerintahan di tanah jajahan yang dimulai dengan melakukan pembentukan Afdelingsboofdplaats (ibu Kota Afdeling) pada tahun 1839. Berdasarkan susunan ketatanegaraan pemerintahan Hindia Belanda, yang dibentuk pada 1839 di Pontianak Kalimantan Barat terbagi atas tiga bagian, yaitu (1). Afdeling pantai selatan dan pantai timur, (2). Afdeling Sambas, dan (3). Afdeling Pontianak. Dampak dari perjanjian-perjanjian mengakibatkan kekuasaan Sultan Pontianak melalui sumber-sumber produksi beralih pada kolonial Hindia Belanda bahkan Hindia Belanda melakukan berbagai tindakan eksploitasi yang dapat mendatangkan berbagai keuntungan, baik berupa monopoli perdagangan, penyerahan wajib, maupun pajak pelabuhan dan ekspor-impor.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Abdullah, T., & Surmijohardjo, A. (1983).



- Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif*. PT. Gramedia.
- Aman. (2014). *Indonesia: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme* (Diana Trisnawati (ed.)). Pujangga Press.
- Arifin, K., Simanjuntak, T., Pojoh, I., & Hisyam, M. (2006). The Austronesia in Borneo. *Austronesian Diaspora and the Ethnogenesis of People in Indonesian Archipelago*.
- Dana, L. (2013). *Tumbuh dan berkembangnya sebuah pasar kota: pasar cina pontianak abad ke-19 sampai abad ke-20*. Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Dirjen Kebudayaan Kemdikbud.
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah. Terjemahan Nugroho Notosusanto*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Harmsen, H. . (1947). *West-Borneo Kalimantan Barat 12 Mei 1947. Uitgave West-Borneo Raad en R.V.D Pontianak. West- Borneo: Drukkerij*.
- Hasanuddin, H. (2016). Politik Dan Perdagangan Kolonial Belanda Di Pontianak. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 8(2), 203. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v8i2.73>
- Hasanuddin, H. (2019). Pelayaran Niaga, Bajak Laut, Perkampungan Pedagang Di Gorontalo. *Walasuji : Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 9(2), 261–275. <https://doi.org/10.36869/wjsb.v9i2.46>
- Herlina, N. (2008). *Metode Sejarah*. Satya Historika.
- Hermansyah. (2010). *Ilmu Gaib di Kalimantan Barat*. PT. Gramedia.
- Hutauruk, A. F. (2020). *Sejarah Indonesia: Masuknya Islam Hingga Kolonialisme*. Yayasan Kita Menulis.
- Johan F cady. (1976). *Southeast Asia: Its Historical Development*. India Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd.
- Kartodirdjo, S. (1971). Laporan Politik Tahun 1837 (Staatkundig Overzicht van Nederlandsch Indie, 1837). *Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 4. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia*.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lapian, A. B. (2009). *Orang laut - bajak laut - raja laut: sejarah kawasan laut Sulawesi abad XIX*. Komunitas Bambu.
- Lestiani, D., & Nurcahyani, L. (2009). *Ibu kota pontianak 1779-1942. Lahir dan Berkembngnya Sebuah Kota Kolonial*. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak.
- Rahmayani, A., & Natarsa, I. (1942). *AKTIVITAS NIAGA ANTARA PONTIANAK DAN SINGAPURA TAHUN 1819-1942* (Cetakan Pe). Penerbit Kepel Press.
- Sujana, U. (2019). Reconstruction of the European Ship Routes in the 16th to 17th Century in Maluku Archipelago (Rekonstuksi Jalur Pelayaran Kapal - Kapal Eropa Abad ke-16 Hingga Abad ke-17 di Kepulauan Maluku). *Jurnal Ar*, 11(1), 29–46.
- Sukmana, W. J. (2021). Metode Penelitian Sejarah (Metode Sejarah). *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(2), 1–4.
- Uray, F. A. (2017). Pengaruh Jaringan Perdagangan Global Pada Struktur Wilayah Dan Konfigurasi Spasial Pusat Pemerintahan Kesultanan-Kesultanan Melayu Di Kalimantan Barat. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 1(1), 67. <https://doi.org/10.26418/lantang.v4i1.20395>
- Veth, P. . (1856). *Borneo's Wester Afdeeling, Geogra\_phisch, Statistisch, Historisch, vooraf\_gegaan door een algemene schets des gangschen eilands*. II. Zaltbomrnel: Joh. Nomanen Zoon.
- Veth, P. J. (1854). *Borneo's Wester-Afdeeling: Geographisch, statistisch, sistorisch, vorafgegaan door eene algemeene schets des ganschen eilands* (Jilid I).

Zaltbommel: Joh. Noman en Zoon.  
Veth, P. J. (1871). *Verslag Over De Residentie  
Borneo's Westkust 1827-1829.*  
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie  
(TNI).